PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DI DESA MUARA PANTUAN KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Perception and Community Participation of Mangrove Forest Conservation in Muara Pantuan Village, Anggana Sub-district, Kutai Kartanegara District

Oon Darmansyah dan Erwiantono
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

ABSTRACT. *Mangrove forests are one of the vital ecosystem components for coastal areas. Therefore, conservation efforts are required for mangrove forests to prevent damage to the broader mangrove forests. The study of local communities through a perception and participation approach was conducted to identify the problem of mangrove forests damage. Aspects of community perception play an essential role in the formulation of mangrove forest management to ensure the sustainability of mangrove forests and maintain community welfare. The survey was conducted from September to December 2017. Respondents in this study are fishers and fish farmers in Muara Pantuan village, Anggana Sub-district, Kutai Kartanegara Regency whom their occupation directly related to the utilization of mangrove forests. Results showed that about 50% of respondents recognized the existence and function of mangrove forests. 15% of respondents did not know about the rules of mangrove forests. Even 30% of them very did not recognize. Regarding law enforcement, 43% of respondents did not know about the law enforcement of mangrove forests although almost 85% of them stated that the regulation of sustainable mangrove forests was required. Furthermore, for the participation of the community, about 57% of respondents were actively involved in the conservation of mangrove forests*.

Keywords: *perception; community participation; preservation of mangrove forests; Muara Pantuan*

ABSTRAK. Hutan mangrove adalah salah satu komponen ekosistem penting bagi kawasan pesisir. Dalam rangka mencegah kerusakan hutan mangrove yang lebih luas lagi maka perlu upaya pelestarian terhadap hutan mangrove yang masih tersisa melalui pendekatan persepsi dan partisipasi melalui kajian masyarakat lokal. Hal ini penting mengingat aspek persepsi masyarakat memegang peranan penting dalam perumusan pengelolaan hutan mangrove agar sumberdaya tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat menjamin keleslarian dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan penelitian di lapangan dilakukan selama 2 (dua) bulan dari bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017. Populasi dalam penelitian adalah masyarakat yang terkait langsung dengan pemanfaatan hutan mangrove yaitu nelayan dan petambak. Persepsi masyarakat Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana mengenai hutan mangrove dimana 50% mengetahui keberadaan dan fungsi hutan mangrove. Tetapi masyarakat tidak mengetahui mengenai peraturan hutan mangrove sebesar 15%, bahkan 30% sangat tidak mengerti atau sangat tidak memahami mengenai peraturan hutan mangrove. Demikian pula mengenai sangsi dimana 43% menyatakan

tidak tahu mengenai sanksi pemanfaatan hutan mangrove, Namun demikian 85% responden menyatakan perlunya peraturan untuk pelestarian hutan mangrove. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Muara Pantuan adalah sebesar 57%, yang berarti bahwa masyarakat sudah cukup aktif untuk mendukung pelestarian hutan mangrove.

***Kata kunci**: persepsi; partisipasi masyarakat; pelestarian hutan mangrove; Muara Pantuan*

Penulis untuk korespondensi, surel: darman5578@gmail.com

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan ekosistem daratan dan perairan tawar. Hutan mangrove adalah salah satu komponen ekosistem penting bagi kawasan pesisir (Odum, 1971). Selanjutnya Krebs (1972) menyatakan bahwa secara ekologis, hutan mangrove berfungsi dan berperan sangat penting dalam proses rantai reproduksi dan makanan berbagai organisme laut, daerah pemijahan, daerah asuhan, tempat mencari makan, khususnya ikan, udang dan kepiting. Selain ditinjau dari fungsi ekologisnya manfaat mangrove juga diketahui memiliki nilai ekonomis yang mendorong kegiatan eksploratif, sehingga mangrove rawan terhadap kerusakan (Saputro, dkk, 2009). Dalam rangka mencegah kerusakan hutan mangrove yang lebih luas di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu upaya pelestarian terhadap hutan mangrove yang masih tersisa melalui pendekatan dan kajian persepsi masyarakat lokal. Hal ini penting mengingat aspek partisipasi dan persepsi masyarakat memegang peranan penting dalam perumusan pengelolaan hutan mangrove agar sumberdaya tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat menjamin keleslarian dan kepentingan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penelitian adalah, untuk mengetahui persepsi serta mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove. Hasil penelitian ini diharpkan dapat mengembangkan kemampuan penalaran dalam rangka membentuk kemandirian bagi peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian untuk mencari temuan baru, kemudian dapat dijadikan acuan dan input bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan pelestarian hutan mangrove.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan di wilayah pesisir Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan lokasi Desa Muara Pantuan. Metode pengambilan sampel menggunakan metode survei, Pemilihan responden sebagai unit penelitian dilakukan dengan sengaja *(purposive sampling),* Cooper dan Emory (1996), Besarnya jumlah sampel secara keseluruhan ditentukan sebanyak 40 responden yang terdiri dari 20 responden Nelayan dan 20 responden petambak. Bourgeois *et, al*. (2002) menyatakan bahwa untuk penelitian sosial di Delta Mahakam responden yang diambil sebanyak 20 orang sudah dapat mewakili.

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat dengan teknik skoring dengan *"Skala Likert"* (Sunyoto, 2009). Kemudian tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan melakukan pengkategorian jawaban responden dan menentukan kualitas tingkat partisipasinya. Langkah-langkah analisis partisipasi yang dilakukan yaitu jumlah skor per variabel untuk setiap pertanyaan maupun secara keseluruhan, kemudian dicari persentase masing-masing dengan memasukan jumlah skor tersebut. Jumlah skor dari seluruh responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Skor Seluruh Responden

Keterangan	JumlahSkor
Maksimal	40 (responden) x 5 = 200
Minimal	40 (responden) x 1 = 40
Median	40 (responden) x 3 = 120
Kuartil I	40 (responden) x 2 = 80
Kuartil III	40 (responden) x 4 = 100

Jumlah skor di atas kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa pendekatan (Sugiyono, 2008) dan untuk menentukan seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat di lokasi penelitian dijabarkan sebagai berikut:

a. Jika **Kuartil III <Skor<Maksimal**, artinya sangat positif (partisipasi dinilai aktif).
b. Jika **Median <Skor<Kuartil III**, artinya positif (partisipasi dinilai cukup aktif).
c. Jika **Kuartil I <Skor< Median**, artinya negatif (partisipasi dinilai kurang aktif).
d. Jika **Minimal <Skor<Kuartil I,** artinya sangat negatif (partisipasi dinilai tidak aktif).

Apabila dipersentasikan, maka besarnya tingkat partisipasi pemangku kepentingan di lokasi studi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Partisipasi} = \frac{Skoryangdiperoleh}{SkorMaksimal} \text{x } 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Anggana merupakan satu diantara delapan belas kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Kecamatan Anggana memiliki luas 1.798,80 km2 dengan kondisi wilayah berbukit dan bergunung dengan ketinggian wilayah dari permukaan laut sampai 2.000 m. Wilayah Kecamatan Anggana secara geografis terletak di daerah khatulistiwa dan berada pada posisi antara 117º 13' BT – 117º 36' BTdan0º24' LS – 0º54'LS dengan luas wilayah 1.798,80 km2. Secara administratif letak wilayah Kecamatan Anggana dengan perbatasan. Sebelah Utara Kecamatan Muara Badak, Sebelah Timur Selat Makasar, Sebelah Selatan Kecamatan Sanga Sanga dan Kecamatan Muara Jawa, Sebelah Barat Kota Samarinda (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara 2016).

Kecamatan Anggana terbagi dalam 8 desa, dimana 5 desa ada di darat, dan 3 desa lainnya berada di wilayah kepulauan adapun jumlah penduduk Kecamatan anggana laki-laki berjumlah 21.555 jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 19.146 jiwa. Desa Muara Pantuan adalah satu diantara desa yang ada di kecamatan Anggana yang berada di kepulauan dengan luas wilayah 51.332 Ha. Untuk luas wilayah konservasi darat adalah 28.027 Ha dan luas wilayah konservasi perairan/laut adalah 13.851 Ha. Sedangkan wilayah pemukiman penduduk hanya seluas 119 Ha. Adapaun jumlah penduduknya sebanyak 5.478 dimana laki-laki sebanyak 3.021 dan perempuan 2.457 dengan jumlah kepala keluarga 1.687 (Profil Desa Muara Pantuan 2016).

Persepsi Masyarakat Tentang Pelestarian Hutan Mangrove

Robbins (2003) menjelaskan persepsi dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Persepsi masyarakat menyangkut pengetahuan tentang hutan mangrove di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana berdasarkan hasil wawancara dimana sebagian besar responden yakni sebanyak 31 responden (78%) menyatakan tahu tentang hutan mangrove dan 5 responden (13%) mengaku kurang tahu. Selanjutnya sebanyak 3 responden (8%) menyatakan tidak tahu dan hanya 1 responden (3%) menyatakan sangat tahu tentang hutan mangrove. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak satu pun responden yang menyatakan sangat tidak tahu tentang hutan mangrove. Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hutan mangrove sangat bervariasi, dimana lebih 50% dari keseluruhan responden mengetahui tentang hutan mangrove yang ada di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana.

Kemudian wawancara mengenai persepsi masyarakat menyangkut fungsi hutan mangrove menunjukkan bahwa sebagian besar responden yakni sebanyak 20 responden (50%) menyatakan mengerti tentang fungsi hutan mangrove bahkan sebanyak 6 responden (15%) menyatakan sangat mengerti tentang fungsi hutan mangrove, kemudian 8 responden (20%) yang mengaku kurang mengerti serta 5 responden (13%) menyatakan tidak tahu fungsi hutan mangrove. Hanya 1 responden (3%) menyatakan sangat tidak mengerti fungsi hutan. Mangrove. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara umum masyarakat di lokasi studi mengerti dan sadar tentang fungsi hutan mangrove.

Selanjutnya penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat apakah mereka mengetahui tentang peraturan hutan mangrove. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh persepsi yang beragam dimana sebagian besar responden yakni sebanyak 15 responden (38%) menyatakan mengerti mengenai pengetahuannya tentang peraturan hutan mangrove, sebaliknya sebanyak 15 responden (38%) menyatakan tidak mengerti mengenai adanya peraturan hutan mangrove, di ikuti 8 responden (20%) kurang mengetahui adanya peraturan hutan mangrove dan 2 responden (5%) sangat tidak mengerti adanya peraturan hutan mangrove, kemudian tidak ada seorang respondenpun yang menyatakan sangat mengerti atau mengetahui peraturan hutan mangrove di Desa Muara Pantuan. Dari hasil kajian diketahui bahwa mayoritas responden kurang dan sangat tidak mengetahui peraturan hutan mangrove di Desa Muara Pantuan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah menyebabkan ketidak mengertian masyarakat terhadap peraturan hutan Mangrove.

Penelitian ini juga mengkaji persepsi masyarakat menyangkut pemahaman mengenai peraturan hutan mangrove. Pemahaman responden menunjukkan bahwa sebanyak 12 responden (30%) sangat tidak mengerti atau sangat tidak memahami mengenai peraturan hutan mangrove di Desa Muara Pantuan, 6 responden (15%) Kurang mengerti adanya peraturan hutan mangrove, kemudian 5 responden (13%) tidak mengerti akan peraturan pengelolaan hutan mangrove, hanya 17 orang responden (43%) yang menjawab mengerti dan sangat mengerti mengenai pemahaman peraturan hutan mangrove di Muara Pantuan. Hal ini menandakan perlunya sosialisasi menyangkut peraturan hutan mangrove harus lebih intensif dilakukan untuk mencegah konversi hutan mangrove.

Persepsi masyarakat pesisir menyangkut kondisi kawasan hutan mangrove di Desa Muara Pantuan, berdasarkan hasil wawancara dengan 40 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebanyak 26 responden (65%) menyatakan kondisi kawasan hutan mangrove keadaannya baik dan sebanyak 8 responden (20%) menyatakan tidak pasti, selanjutnya sebanyak 5 responden (13%) menyatakan kurang baik, kemudian 1 responden (3%) menyatakan kondisi kawasan hutan mangrove sangat tidak baik, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat baik mengenai kondisis kawasan hutan mangrove yang ada. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa secara umum penilaian masyarakat megenai tanggapan tentang kawasan hutan mangrove di Kecamatan Muara Pantuan para responden menjawab baik karena adanya penanaman yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan perusahaan migas.

Selanjutnya juga diteliti mengenai persepsi masyarakat pesisir tentang pemahaman mereka atas institusi yang bertanggung jawab dalam pelestarian mangrove. Dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden yakni sebanyak 28 responden (70%) memilih Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pelestarian hutan mangrove, kemudian 10 responden (25%) menyatakan Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab terhadap hutan mangrove, dan 2 responden (5%) memilih Badan Lingkungan Hidup sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Muara Pantuan. Dari hasil wawancara diketahui bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa Badan Pengelolaan

DAS bertanggung jawab atas pelestarian hutan mangrove. Hasil kajian ini diketahui bahwa semua institusi bertanggung jawab atas pelestarian hutan mangrove. Implikasi dari penilaian tersebut masyarakat beranggapan bahwa perlunya sinergi semua lembaga tersebut untuk pelestarian hutan mangrove di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, agar dapat dimanfaatkan untuk aktifitas budidaya kehutanan maupun perikanan.

Kajian persepsi masyarakat menyangkut perlu tidaknya peraturan untuk pelestarian hutan mangrove di Desa Muara Pantuan menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebanyak 34 responden (85%) menyatakan perlunya peraturan untuk pelestarian hutan mangrove, selanjutnya sebanyak 6 responden (15%) menyatakan sangat perlu. Dari hasil persepsi di atas diketahui bahwa masyarakat menganggap perlu untuk mengatur pelestarian hutan mangrove karena mereka menganggap meskipun kondisi hutan mangrove masih baik namun dibutuhkan aturan. Implikasi dari hal ini adalah bahwa peranan lembaga pemerintah diharapkan lebih meningkatkan akses informasi dan sosialisasi mengenai peraturan dan undang undang mengenai hutan mangrove kepada masyarakat.

Penelitian ini juga mengkaji tentang persepsi masyarakat atas pengetahuan masyarakat terhadap sanksi dari yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan hutan mangrove, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebanyak 17 responden (43%) menyatakan tidak tahu mengenai sanksi pemanfaatan hutan mangrove, diikuti sebanyak 5 responden (13%) menyatakan kurang tahu, selanjutnya 3 responden (8%) menyatakan sangat tidak tahu tentang adanya sanksi pelanggaran, disisi lain 15 responden (38%) mengetahui mengenai sanksi pemanfaatan hutan mangrove. Hal Ini disebabkan karena minimnya pengetahuan mereka mengenai peraturan hutan mangrove dan ini dapat berimplikasi kepada meningkatnya pemanfaatan hutan mangrove untuk kegiatan pertambakan dan pembukaan lahan untuk pemukiman.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove

Menurut Utomo (2004) dalam Majalah Gema Desa Hutan, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dimaksudkan sebagai pelibatan atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan atau kejadian tertentu yang mendukung pelestarian sumberdaya hutan. Pendapat masyarakat Desa Muara Pantuan mengenai partisipasi masyarakat dimulai dengan keaktifan masyarakat dalam menghadiri rapat atau pertemuan membahas pelestarian hutan mangrove. Hasil dari wawancara menunjukkan sebagian besar responden 19 responden (48%) menyatakan kurang sering mengenai kehadiran pada rapat membahas pelestarian hutan mangrove, diikuti sebanyak 11 responden (28%) menyatakan sangat tidak sering menghadiri rapat dan sebanyak 8 responden (20%) menyatakan tidak tahu, hanya ada masing-masing 2 responden (5%) yang sering mengahadiri rapat atau pertemuan dalam pelestarian hutan mangrove. Kemudia tidak ada responden yang menyatakan sangat sering menghadiri rapat tentang pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Muara Pantuan.

Selanjutnya diteliti mengenai partisipasi masyarakat tentang keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi peraturan hutan mangrove. hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir sebanyak 18 responden (45%) kurang sering terlibat dalam sosialisasi peraturan tentang pelestarian hutan mangeove, sebanyak 11 responden (28%) menyatakan tidak tahu, kemudian 9 responden (23%) menyatakan sangat kurang untuk terlibat dalam sosialisasi peraturan tentang pelestarian hutan mangrove dan hanya 2 responden (5%) menyatakan sering dilibatkan dalam sosialisasi peraturan tentang hutan mangrove. Hasil wawancara menunjukkan tidak ada responden yang menyatakan sangat sering dilibatkan dalam sosialisasi mengenai pelestarian hutan mangrove.

Partisipasi masyarakat dalam mengusulkan pendapat dalam rapat atau pertemuan tentang

peraturan pelestarian hutan mangrove menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir sebanyak 32 responden (80%) menyatakan sangat tidak pernah mengusulkan pendapat dalam rapat tentang pelestarian hutan mangrove, 6 responden (15%) menyatakan kurang sering, dan 2 responden (5%) menyatakan tidak tahu. Hasil wawancara juga menunjukkan tidak ada responden yang menyatakan sering atau sangat sering dalam mengusulkan pendapat dalam rapat tentang peraturan pelestarian hutan mangrove.

Selanjutnya dikaji partisipasi masyarakat pesisir mengenai faktor pendorong untuk keterlibatan mereka dalam rapat membahas peraturan pelestarian hutan mangrove. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat pesisir sebanyak 15 responden (38%) menyatakan mengikuti orang lain menyangkut faktor pendorong apa untuk terlibat dalam rapat tentang pelestarian hutan mangrove, sebanyak 6 responden (15%) menyatakan tidak tahu, 4 responden (10%) menyatakan tidak ada keputusan, kemudian 10 responden (25%) karena kemauan sendiri dan sebanyak 5 responden (13%) menyatakan karena perintah seseorang.

Partisipasi masyarakat pesisir tentang sumbangan apa yang mereka berikan dalam kegiatan sosialisasi peraturan pelestarian hutan mangrove juga telah dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan 40 responden menunjukkan bahwa masyarakat pesisir sebanyak 31 responden (78%) menyatakan menyumbang tenaga untuk kegiatan sosialisasi tentang pelestarian hitan mangrove, sebanyak 3 responden (8%) menyatakan menyumbang dalam bentuk materi, kemudian 2 responden (5%) menyumbang dalam bentuk pikiran dan masing-masing 2 responden (5%) menyatakan tidak pasti dan tidak menyumbang apa-apa untuk kegiatan sosialisasi tentang pelestarian hutan mangrove. kemudian tidak ada responden yang menyatakan tidak pasti mengenai sumabangan apa yang diberikan untuk pelestarian hutan mangrove. Hasil ini berkaitan dengan temuan persepsi masyarakat sebelumnya karena mereka tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk hadir dalam rapat dan memberikan sumbangan untuk kegiatan pelestarian hutan mangrove.

Selanjutnya juga dianalisis pendapat masyarakat pesisir menyangkut keterlibatannya dalam pengawasan peraturan pelestarian hutan mangrove. Berdasarkan hasil wawancara bahwa masyarakat pesisir sebanyak 21 responden (40%) menyatakan bersedia dalam keterlibatan untuk pengawasan pelestarian hutan mangrove, sebanyak 7 responden (18%) menyatakan tidak tahu kemudian 6 responden (15%) kurang bersedia dan sebanyak 5 responden (13%) mengaku sangat tidak bersedia. Hanya 1 responden (3%) menyatakan sangat bersedia dalam keterlibatan pengawasan pelestarian hutan mangrove di Desa Muara Pantuan. Berdasarkan hasil di atas dapat dikatakan bahwa sebagian besar menyatakan ketersediaannya untuk terlibat pengawasan peraturan pelestarian hutan mangrove. Hal ini positif mengingat partisipasi masyarakat masih rendah dalam hal kehadiran dan terlibat dalam sosialisasi peratutan hutan mangrove di Desa Muara Pantuan. Diharapkan pemerintah dapat memnfaatkan potensi kesediaan masyarakat ini untuk lebih meningkatkan partisipasi mereka melalui peningkatan intensitas komunikasi antar lembaga di lapangan.

Partisipasi masyarakat pesisir tentang perlunya keterlibatan masyarakat-pemerintah-swasta dalam penyusunan peraturan pelestarian hutan mangrove juga dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara sebanyak 31 responden (70%) menyatakan perlunya keterlibatan masyarakat-pemerintah-swasta dalam penyusunan peraturan dalam pelestarian hutan mangrove, 4 responden (10%) menyatakat sangat perlu, selanjutnya 3 responden (10%) menyatakan tidak pasti kemudian sebanyak 2 responden (10%) menyatakan sangat tidak perlu keterlibatan masyarakat-pemerintah-swasta dalam penyusunan pelestarian hutan mangrove. Berdasarkan persepsi responden, sebagian besar responden menyatakan perlu adanya keterlibatan masyarakat-pemerintah-swasta dalam penyusunan peraturan dalam pelestarian hutan mangrove. Hal ini berarti bahwa masyarakat

terbuka untuk dilibatkan dalam skema kemitraan dengan pihak pemerintah dan swasta. Diperkirakan dengan skema kemitraan ini akan lebih mendorong meningkatnya kompabilitas pelestarian hutan mangrove melalui program-program pembangunan yang relevan dan dilaksanakan bersama-sama.

Terakhir, masyarakat di lokasi studi juga telah ditanyakan partisipasi mereka tentang keyakinan bahwa usaha pengembalian fungsi hutan mangrove ini akan berhasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan 40 responden di lokasi studi diketahui masyarakat pesisir sebanyak 27 responden (68%) meyakini akan yakin berhasil dalam upaya pengembalian fungsi hutan mangrove, sebanyak 6 responden (15%) menyatakan tidak pasti kemudian 5 responden (13%) kurang yakin fungsi hutan mangrove akan berhasil, dan hanya 2 responden (5%) yang menyatakan sangat yakin usaha tersebut dapat mengembalikan fungsi hutan mangrove. Berdasarkan informansi responden di atas diketahui bahwa sebagian masyarakat pesisir menyatakan keyakinannya akan keberhasilan dalam usaha pengembalian fungsi hutan mangrove di Desa Muara Pantuan. Hal ini sangat penting karena keyakinan merupakan faktor utama yang mempengaruhi semangat dan efektifitas *stakeholders* untuk meningkatkan kompabilitas pelestarian hutan Mangrove.

Skor Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove

Berdasarkan hasil penilaian, diketahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat pesisir dalam pelestarian hutan mangrove di Desa Muara Pantuan dengan melihat skor keseluruhan yang diperoleh berdasarkan indikator-indikator sebagaimana yang terlihat pada skor indikator pada Gambar 1.

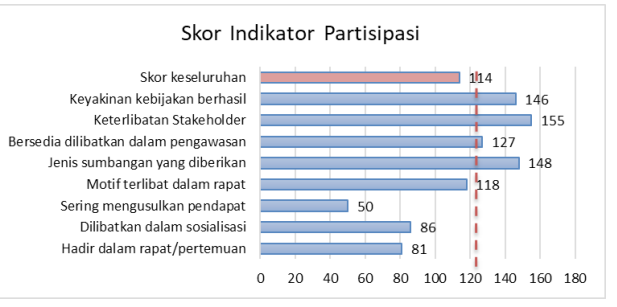

Gambar 1. Skor Indikator Partisipasi Masyarakat

Pengukuran setiap skor indikator ini diketahui bahwa ada (1) Hadir dalamrapat/pertemuan dengan skor 81; (2) Dilibatkan dalam sosialisasi 86 ; (3) Sering mengusulkan pendapat 50 ; (4) Motif terlibat dalam rapat 118 (5) Jenis sumbangan yang diberikan 148 ; (6) Bersedia dilibatkan dalam pengawasan 127 ; (7) Keterlibatan Stakeholders 155 ; (8) Keyakinan kebijakan berhasil 146. Selanjutnya juga dihitung skor keseluruhan dari indikator partisipasi masyarakat diperoleh nilai sebesar 114 (skor yang diperoleh).

Dari hasil pengukuran setiap skor indikator ini diketahui bahwa ada 4 (empat) indikator partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove yang berada di atas median (nilai tengah), yakni indikator jenis sumbangan yang diberikan, bersedia dilibatkan dalam pengawasan, keterlibatan masyarakat-pemerintah-swasta, dan indikator keyakinan kebijakan akan berhasil yang berarti masing-masing indikator partisipasi tersebut dapat dikatakan cukup aktif, apa bila di presentasikan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{114}{200} \times 100\%$$

$$= 57\%$$

Implikasinya adalah masyarakat pesisir di lokasi studi memiliki potensi untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan dilibatkan dalam pengawasan dalam skema kemitraan dengan pemerintah dan swasta dalam rangka pelestarian hutan mangrove di Desa Muara Pantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari nilai tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Muara Pantuan dalam pelestarian hutan mangrove sudah cukup aktif untuk mendukung

pelestarian hutan mangrove di Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Persepsi masyarakat mengenai hutan mangrove dimana 50% mengetahui keberadaan dan fungsi hutan mangrove. Tetapi 15% masyarakat tidak mengetahui mengenai peraturan hutan mangrove, bahkan 30% sangat tidak mengerti atau sangat tidak memahami mengenai peraturan hutan mangrove. Demikian pula mengenai sangsi dimana 43% menyatakan tidak tahu mengenai sanksi pemanfaatan hutan mangrove, Namun demikian 85% responden menyatakan perlunya peraturan untuk pelestarian hutan mangrove.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Muara Pantuan adalah sebesar 57% yang berarti bahwa masyarakat sudah cukup aktif untuk mendukung pelestarian hutan mangrove.

Saran

Perlunya pengaturan segera mengenai zonasi hutan mangrove dengan lahan yang dimiliki oleh masyarakat guna mencegah kerusakan hutan mangrove yang lebih luas lagi di Kecamatan Muara Pantuan. Peningkatan upaya-upaya penegakan hukum terhadap aktivitas yang melanggar fungsi kawasan hutan mangrove. Peningkatan kuantitas penyuluh lapangan dan peningkatan kesadaran masyarakat dalampelestarian hutan mangrove melalui sosialisasi, pembuatan poster/leaflet dan kegiatan sejenis lainnya. Diberikannya pelatihan penanaman dan perawatan mangrove kepada kelompok wanita untuk meningkatkan partisipasinya dalam pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Muara Pantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Stastik Kabupaten Kutai Kartanegara 2016. Kutai Kartanegara Dalam Angka Tahun 2016.

Bourgeois, *et.al.* (2002) A Socio-Economic and Institutional Analysis of Mahakam Delta Stakeholders unpublished report.

Cooper,D.R.dan C.W.Emory,1996. Metode Penelitian Bisnis, Edisi Kelima, alih bahasa Widyono Soetjipto, Jakarta: Erlangga.

Kantor Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, Profil Desa Muara Pantuan Kecamatan Anggana, kabupaten kutai kartanegara, 2016.

Krebs, C.J. 1972. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance. Harper and Row Publishers, Inc.

Odum, E.P. 1971. Fundamentals of Ecology. Third Edition. W.B. Saunders Company. London.

Robbins, S. P. (2003) Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi Aplikasi. Edisi Kedelapan. Trans. Pujaatmaka, H & Molan, B. Jakarta: Pt. Prenlindo.

Saputro, G. B., dkk. 2009. Peta Mangroves Indonesia. Jakarta: Pusat Survei Sumber Daya Alam Laut, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

Sunyoto, Danang. 2009. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. BPFE, Yogyakarta.

Utomo P (2004) Partisipasi Tidak Sekedar Pelibatan Dalam Kegiatan, Dalam Majalah Gedeha (Gema Desa Hutan) Edisi XIV, Pebruari 2004